

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamis, 4 Oktober 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 4 Oktober 2018	Badan Usaha Tunggu Rp 17 Triliun Kembali	Sampai dengan akhir September 2018, badan usaha jalan tol masih belum menerima pembayaran atas dana talangan lahan sekitar Rp 17 triliun dari total biaya Rp 40 triliun yang sudah digelontarkan sejak kebijakan tersebut dibuat pada 2015.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 4 Oktober 2018	Berita Foto	Jembatan Musi IV Mencapai 95%
3	Media Indonesia (Halaman, 13)	Kamis, 4 Oktober 2018	Perkuat Infrastruktur Tahan Bencana	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan Indonesia sudah saatnya mengambil pelajaran dari bencana gempa di Lombok.

Judul	Badan Usaha Tunggu Rp 17 Triliun Kembali	Tanggal	Kamis, 4 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Sampai dengan akhir September 2018, badan usaha jalan tol masih belum menerima pembayaran atas dana talangan lahan sekitar Rp 17 triliun dari total biaya Rp 40 triliun yang sudah digelontorkan sejak kebijakan tersebut dibuat pada 2015.		

Badan Usaha Tunggu Rp17 Triliun Kembali

JAKARTA — Sampai dengan akhir September 2018, badan usaha jalan tol masih belum menerima pembayaran atas dana talangan lahan sekitar Rp17 triliun dari total biaya Rp40 triliun yang sudah digelontorkan sejak kebijakan tersebut dibuat pada 2015.

Irene Agustine
www.agustine@csn.com

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Disaputra Zuna mengatakan bahwa sebagian besar dana yang belum dibayarkan tersebut masih dalam proses administrasi karena dokumen belum lengkap sehingga belum ditagihkan ke pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Selain itu, ada juga yang berada pada proses untuk menunggu laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proses exit meeting, dan lainnya.

BPTJ, katanya, tengah memetakan sejumlah dana talangan yang belum dibayar untuk bisa dipercepat prosesnya. Dengan begitu, dana talangan dari badan usaha dibayarkan segera kembali untuk diputar. "Jadi, kami sedang kejar ke bawah supaya prosesnya dipercepat untuk bisa ditagihkan kepada LMAN. Di bawah ini masih banyak di PPK [Pejabat Pembuat Komitmen]," kata Herry kepada *Bisnis*, Selasa (2/10).

Berdasarkan data LMAN per September 2018, alokasi dana talangan pada 2016—2017 mencapai Rp42,19 triliun dengan rincian pada 2016 sebesar Rp15,50 triliun dan tahun lalu Rp26,69 triliun.

Dari jumlah itu, nilai yang ditagihkan kepada LMAN baru Rp24,02 triliun, sedangkan yang sudah dibayarkan kepada badan usaha mencapai Rp23,59 triliun.

Selain itu, Herry menegaskan pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman antara badan usaha jalan tol dan LMAN pada pekan depan terkait dua hal.

Pertama, memperbaharui perjanjian dana talangan 2017 dengan penyesuaian

➤ Sebagian besar dana yang belum dibayarkan tersebut masih berada dalam proses administrasi.

pelaksanaan sampai sejauh ini dan kedua, kesepakatan pemberian dana talangan Tahun Anggaran 2018. "Untuk 2017 ada beberapa yang kurang alokasinya sehingga harus ditambah, misalnya, ruas Semarang—Batang, sedangkan yang 2018 ini untuk pembayaran baru," jelas Herry.

Pembayaran dana talangan tanah untuk pembangunan tol biasanya dilakukan bertahap.

Pada 2016, LMAN menganggarkan Rp16 triliun untuk 27 proyek jalan tol, pada 2017 sebanyak Rp25,28 triliun untuk 43 proyek tol, dan pada 2018 sebanyak Rp18,13 triliun untuk 23 proyek tol. Rencananya, pada tahun depan LMAN menganggarkan Rp27,76 triliun untuk 38 proyek tol.

INGIN SEGERA CAIR

Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidianto mengatakan bahwa sejauh ini, perusahaan telah menggelontorkan

dana talangan sebanyak Rp13 triliun dan baru dikembalikan Rp7 triliun.

Menurutnya, dari total Rp5 triliun yang belum dibayarkan, yang tengah diproses BPKP untuk selanjutnya bisa ditagihkan kepada LMAN mencapai Rp3,80 triliun.

"Kami berharap bisa cair segera Rp3,80 triliun ini untuk bisa kami pakai lagi. Bulan depan kami harap sudah ada pengembalian walaupun mungkin tidak sebanyak itu karena masih ada tanah wakaf dan TKD [tanah kas desa] yang prosesnya lama," katanya.

Beberapa ruas tol Waskita Toll Road yang melampirkan fasilitas ini, contohnya, Cibitung—Cilincing, Cimanggis—Cibitung, Pejagan—Pematang, Pematang—Batang, Bekasi—Cawang—Kampung Melayu, dan Krian—Legundi—Bonder—Manyar.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang Arie Irianto juga menghaipkan pembayaran LMAN atas realisasi talangan yang sudah dilakukan badan usaha untuk segera dikembalikan.

Saat ini, katanya, perusahaan telah menalang dana pembebasan lahan sebesar Rp5,30 triliun untuk ruas Semarang—Batang sepanjang 75 kilometer (km) dan baru dikembalikan Rp3,90 triliun. Nilai tersebut belum termasuk tambahan talangan karena adanya penetapan lokasi baru yang destinasi mencapai Rp1,02 triliun. ■

Talangi Dulu, Diganti Kemudian



Sejak aturan dana talangan tanah dikeluarkan pada 2015, badan usaha jalan tol mulai menerima pengembalian dana atas pembebasan lahan yang dilakukannya bersumber dari APBN mulai dari Tahun Anggaran 2016. Kendati demikian, proses yang lama di lapangan membuat badan usaha jalan tol harus menunggu lama pengembalian dana yang mekanismenya dibayarkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara tersebut.

Alokasi Anggaran PSN Jalan Tol

Keterangan	APBN- P2016	APBN- P2017	APBN 2018	APBN 2019
Jumlah proyek	27	43	23	38
Alokasi (Rp triliun)	15,50	24,69	18,13	27,76
Dibayar (Rp triliun)	13,14	10,45	0	0

Sumber: LMAN, diolah

BISNIS/HUSIN PARAPAT

Pembebasan Lahan Cibitung—Cilincing Dikebut

JAKARTA — PT Waskita Toll Road mempercepat pembebasan lahan proyek jalan tol Cibitung—Cilincing sepanjang 34 kilometer untuk memacu proses konstruksi. Jalan tol Cibitung—Cilincing merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road II.

Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidianto mengatakan bahwa saat ini progres pembebasan lahan proyek dengan nilai investasi Rp4,22 triliun tersebut baru mencapai 46%.

Sementara itu, lanjutnya, realisasi konstruksi dari lahan yang sudah dibebaskan baru mencapai 18%.

"Masih ada spot-spot yang belum dikerjakan. Kami masih fokus pembe-

basan lahan, sudah ada tapat kemarin dengan BPN [Badan Pertanahan Nasional]," kata Herwidianto kepada *Bisnis*, akhir pekan lalu.

Kendati masih berproses dengan persoalan tanah, Herwidianto mengemukakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala yang membatalkan karena proses pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan pemerintah saat ini sangat jelas.

"Kendala biasa saja di tanah karena sekarang kan sudah jelas prosesnya. Kalau ada kendala [penyelesaiannya] ke konsinyasi [di pengalihan]," jelasnya. Sebelumnya, Waskita Toll Road fokus

melakukan pengerjaan jalan layang Cibitung—Cilincing karena lahannya relatif sudah bebas.

Herwidianto memperkirakan penyelesaian salah satu PSN tersebut paling lama pada 2020 dan diharapkan bisa dipercepat sebelum tahun itu.

Ruas tol tersebut terdiri atas empat seksi, yakni seksi 1 Cibitung—Telagaasih sepanjang 2,96 kilometer; seksi 2 Telagaasih—Bembelang 9,41 kilometer; seksi 3 Bembelang—Mekarjaya 13,09 kilometer; dan seksi 4 Mekarjaya—Cilincing 8,56 kilometer.

Kehadiran jalan tol tersebut nantinya diharapkan dapat mengurangi beban angkutan barang dan kendaraan di

ruas jalan tol Jakarta—Cikampek yang melintasi kawasan Cawang.

Dalam peninjauan baru-baru ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan tiga ruas dalam jaringan JORR II dapat diresmikan pada tahun depan.

Ketiga ruas tol tersebut yakni Kunciran—Serpong sepanjang 11,14 km, Batuceper—Kunciran—Cengkareng (Bandara Soekarno-Hatta) 14,19 km, dan Cineo—Serpong sepanjang 10,14 km.

"Insyaallah pada 2019, JORR 2 akan siap dioperasikan sehingga akan memperlancar mobilitas kaum urban dan meningkatkan aktivitas ekonomi," ujarnya. (Irene Agustine)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 4 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Jembatan Musi IV Mencapai 95%		

► **JEMBATAN MUSI IV MENCAPAI 95%**



Antara/Nova Wahyudi

Aktivitas pembangunan Jembatan Musi IV di Palembang, Sumatra Selatan, pekan lalu. Saat ini pengerjaan pembangunan Jembatan Musi IV sudah mencapai 95%, dan diperkirakan semua

pekerjaan mega proyek tersebut akan rampung akhir November 2018.

Judul	Perkuat Infrastruktur Tahan Bencana	Tanggal	Kamis, 4 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 13)		
Resume	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan Indonesia sudah saatnya mengambil pelajaran dari bencana gempa di Lombok.		

Perkuat Infrastruktur Tahan Bencana

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan Indonesia sudah saatnya mengambil pelajaran dari bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, serta Palu dan Donggala di Sulawesi Tenggara, dengan memperkuat infrastruktur yang tahan gempa.

Atas dasar itulah, dia berencana memanfaatkan pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 untuk membahas pembangunan infrastruktur tahan bencana alam, khususnya gempa. Thomas menjelaskan bahwa BKPM bekerja sama dengan PT Bank HSBC Indonesia akan menyelenggarakan Forum Infrastruktur di Ayana Hotel, Jimbaran, Bali, pada 11 Oktober 2018, sebagai rangkaian kegiatan pertemuan tahunan tersebut.

“Event HSBC-BKPM tentunya adalah soal pembiayaan infrastruktur. Aspek yang jadi menarik bagaimana memastikan infrastruktur dari kemungkinan bencana alam. Saya pribadi ingin memanfaatkan peluang IMF-WB untuk membicarakan aspek bencana,” kata Thomas kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Thomas menjelaskan seiring dengan bertumbuhnya ekonomi serta kondisi geografis Indonesia, industri sektor penanggulangan bencana harus mendapat perhatian, baik dari sisi pendanaan maupun sektor keuangan secara umum. Dari segi pembiayaan, Thomas menambahkan industri penanggulangan bencana dapat dimulai dari inovasi produk keuangan, seperti asuransi terhadap kesiapan bencana.

“Ini mungkin bisa dibantu dari sektor keuangan melalui kalkulasi hitungan dalam kriteria pendanaan, asuransi kesiapan bencana, misalnya bagaimana mendanai stok-stok barang yang diperlukan,” ungkapnya.

Infrastructure Forum yang akan digelar di Bali nanti diharapkan dapat mendorong sektor swasta berperan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Kegiatan itu direncanakan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, yang selanjutnya diisi dengan sesi panel dari BKPM, BI, OJK, dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri. Sesi panel selanjutnya antara lain diisi perwakilan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Price Waterhouse Coopers Indonesia. (Nur/E-2)